

Reaktualisasi Tafsir Qur'an Surah Al -Dhuha Ayat 9 Dalam Kritik Etika Anggaran Publik: Studi Kasus Program Makan Bergizi Gratis

Muhammad Rafsanjani

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah (STIQSI) Lamongan
penaklukandalusia8@gmail.com

Ulfatul Halimah

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah (STIQSI) Lamongan
ulfatulhalimah@gmail.com

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis nasional, namun pengelolaannya menuai kritik terkait akuntabilitas anggaran yang dinilai tidak sistematis. Penelitian ini bertujuan mengkaji etika pengelolaan anggaran tersebut melalui tafsir Surah al-Dhuha ayat 9 berdasarkan pemikiran Prof. Salman Harun dalam buku *Secangkir Tafsir*. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir kontekstual, penelitian ini menemukan bahwa reinterpretasi "*keyatiman*" sebagai kepingangan (gap) sosial memberikan landasan teologis untuk mengkritik kebijakan fiskal yang "*serampangan*". Pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel dinilai sebagai manifestasi dari perilaku sewenang-wenang (*qahr*) struktural yang dilarang Al-Qur'an, karena membuka celah eksploitasi oleh kelompok kuat terhadap hak-hak kaum rentan. Penelitian menyimpulkan bahwa akuntabilitas fiskal merupakan manifestasi modern dari nilai *fala taqhar*. Perlindungan terhadap kelompok lemah dalam kebijakan publik menuntut ketepatan manajerial yang transparan, bukan sekadar kebijakan populis yang nir-akuntabilitas.

Kata Kunci: *Surah al-Dhuha, Salman Harun, Etika Anggaran, Makan Bergizi Gratis, Keadilan Struktural*

Abstract:

The Free Nutritious Meal program is a strategic national policy, yet its management has faced criticism regarding budget accountability, which is perceived as unsystematic. This study examines the ethics of budget management through the interpretation of Surah al-Dhuha verse 9, based on Prof. Salman Harun's perspective in the book *"Secangkir Tafsir"*. Using a qualitative method with a contextual interpretation approach, the study finds that reinterpreting "*orphanhood*" as a social gap provides a theological basis for criticizing haphazard fiscal policies. Unaccountable budget management is viewed as a form of structural oppression (*qahr*) prohibited by the Quran, as it creates opportunities for powerful groups to exploit the rights of the vulnerable. The study concludes that fiscal accountability is a modern manifestation of the "*fala taqhar*" principle. Protecting marginalized groups in public policy requires transparent managerial precision rather than merely populist policies lacking accountability.

Keywords: *Surah al-Dhuha, Salman Harun, Budget Ethics, Free Nutritious Meal, Structural Justice.*

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis tidak lain ialah hasil keputusan yang diproyeksikan untuk menyelesaikan permasalahan gizi serta mengupgrade kualitas masyarakat

Indonesia secara visioner.¹ Sebagai instrumen kemakmuran sosial, kebijakan demikian mengantongi narasi tinggi sebagaimana peran negara mencukupi kebutuhan masyarakat.² Adapun, keberhasilan agenda tersebut tidak digantungkan pada keluhuran tujuannya, melainkan paling utama menjaga etika kepengurusan dan kepercayaan tata kelola anggarannya. Kesuksesan program megah tersebut juga sangat mengandalkan kemampuan mengelola sumber daya fiskal secara terbuka, terpercaya, dan bergantung pada administrasi yang bersih.³

Fakta lapangan menjelaskan Program Makanan Bergizi Gratis berhasil memantik persoalan kritis sebab pemborosan anggaran yang tidak tertutup.⁴ Jumlah alokasi dana serta ketidakjelasan asalnya mensyaratkan keraguan ekonomi yang berpotensi menjadikan peruangan nasional semakin kacau. Kondisi demikian menandakan kemerosotan etika, di mana narasi populis lebih dikedepankan dibandingkan kalkulasi teknokratis yang matang. Perencanaan yang tidak akurat ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan problem moral karena berpotensi menciptakan inefisiensi yang merugikan rakyat, terutama ketika anggaran besar tersebut tidak memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah kebocoran di level eksekusi.⁵

Sejauh ini, literatur yang membahas Program Makanan Bergizi Gratis mayoritas didominasi oleh perspektif ekonomi makro terkait dampak fiskal atau perspektif politik praktis mengenai populisme elektoral.⁶ Penelitian terdahulu cenderung membedah

¹ Internal BGN, "Pentingnya Program MAKANAN BERGIZI GRATIS: Tingkatkan SDM dan Pencegahan Stunting," Jakarta: Badan Gizi Nasional, April 6, 2025, <https://www.bgn.go.id/news/artikel/pentingnya-program-Makanan-Bergizi-GGratis-tingkatkan-sdm-dan-pencegahan-stunting>.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ahli: Negara Wajib Memenuhi Hak Dasar Warga Negara dari Kelas Pekerja," Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, June 8, 2024, <https://www.mkri.id/berita/ahli:-negara-wajib-memenuhi-hak-dasar-warga-negara-dari-kelas-pekerja-21258>.

³ Badan Gizi Nasional, "Kepala BGN Tegaskan Penggunaan Keuangan Negara Dilakukan Berlapis dan Transparan," Jakarta: Badan Gizi Nasional, April 8, 2026, <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/kepala-bgn-tegaskan-penggunaan-keuangan-negara-dilakukan-berlapis-dan-transparan>.

⁴ Indonesia Corruption Watch, "Makan Gratis Pakai Anggaran Pendidikan: Tipu-Tipu Pemenuhan 20% APBN untuk Pendidikan," Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, August 30, 2024, <https://antikorupsi.org/id/makan-gratis-pakai-anggaran-pendidikan-tipu-tipu-pemenuhan-20-apbn-untuk-pendidikan>.

⁵ Agung Nugroho, "Program MAKANAN BERGIZI GRATIS Dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu," Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, March 11, 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/program-Makanan-Bergizi-GGratis-dinilai-berisiko-pemborosan-sebaiknya-diprioritaskan-pada-anak-keluarga-kurang-mampu/>.

⁶ Yosef P. Koton, Djefrianto Nusi, and Misbahudin Djaba, *Kontribusi Program Makanan Bergizi Gratis (Makanan Bergizi Gratis) Terhadap Ekonomi Lokal Di Provinsi Gorontalo*, (Universitas Bina Taruna Gorontalo) 2, no. 2 (November 2025): 110–18, <https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/P-JIAMS/article/view/410/418>.

kebijakan ini dari sudut pandang efektivitas distribusi logistik dan pemenuhan gizi tanpa menyentuh aspek teologis-normatif yang mendasarinya.⁷ Terdapat kekosongan literatur (*research gap*) dalam melihat bagaimana teks-teks suci Al-Qur'an memberikan rambu-rambu etis terhadap pengelolaan anggaran publik yang ditujukan bagi kaum lemah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan mendalam yang mampu menghubungkan antara kritik kebijakan publik dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam literatur tafsir Al-Qur'an kontemporer.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan lensa tafsir Surah al-Dhuha ayat 9 melalui pemikiran Prof. Salman Harun dalam bukunya *Secangkir Tafsir*. Salman Harun memberikan reinterpretasi radikal terhadap konsep "*keyatiman*" sebagai representasi dari kepincangan (*gap*) struktural dalam masyarakat yang rentan menjadi sasaran eksploitasi oleh golongan kuat. Melalui perspektif ini, larangan berlaku sewenang-wenang (*fala taqhar*) terhadap anak yatim dimaknai secara luas sebagai larangan bagi pemegang otoritas untuk bertindak serampangan dalam mengelola hak-hak kelompok lemah. Analisis ini menjadi relevan untuk membedah bagaimana kebijakan anggaran publik seharusnya dikelola dengan empati dan ketelitian manajerial sebagai bentuk tanggung jawab teologis.⁸

Kelangkaan kajian ini terletak pada upaya reaktualisasi nilai-nilai pembelajaran dalam Surah Al-Dhuha ke dalam konteks kebijakan ekonomi kontemporer. Selama ini, mayoritas kajian cenderung berhenti pada kerangka normatif. Penelitian ini berupaya melampaui batas tersebut dengan menggunakan kerangka berpikir Salman Harun sebagai dasar analisis untuk mengkritisi kebijakan Makanan Bergizi Gratis yang dinilai kurang transparan dan dinilai cenderung menguntungkan sebelah pihak.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan pada perumusan landasan etika anggaran publik dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya dalam membaca kasus kebijakan Makanan Bergizi Gratis. Fokus utama diskursus ini adalah menelaah bagaimana transformasi makna Surah Al-Dhuha [93]: 9 dapat memberikan dasar kritis terhadap praktik pengelolaan anggaran yang tidak transparan.

⁷ Chikita Ramadhani et al., "Pemahaman Kualitas Gizi Dan Kehalalan Program Makanan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Mahasiswa Gizi : Tinjauan Hadis Nabi Muhammad Saw Terhadap Isu Kontaminasi Dan Pangan Ultra – Proses," *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 15, no. 1 (January 2026): 104–17, <https://doi.org/10.52657/jik.v15i1.3408>.

⁸ Salman Harun, *Secangkir Tafsir Juz Terakhir* (Tangerang: Lentera Hati, 2017), 228.

Selain itu, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi tafsir kontemporer, sekaligus memberikan rujukan normatif bagi para pengambil kebijakan agar kembali pada prinsip-prinsip dasar keadilan sosial. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an, kebijakan yang dirumuskan secara visioner diharapkan mampu menjadi pijakan bagi integritas moral dalam tata kelola publik.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan gaya penalaran deduktif. Tahap interpretasi diawali dengan mendekonstruksi paradigma Salman Harun akan konsep "*keyatiman struktural*" dan larangan *qahr* (kesewenang-wenangan), kemudian dimaknai sebagai instrumen kritik guna membedah diskursus kepengurusan alokasi uang Makanan Bergizi Gratis yang opasitas. Tiap data dianalisis melalui teknik dokumentasi dan triangulasi sumber literatur guna merumuskan sebuah tatanan etika anggaran publik yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan Al-Qur'an. Proses ini berfokus menghasilkan sintesis yang memberikan rekomendasi transformatif bagi perbaikan tata kelola kebijakan publik di Indonesia.

Pembahasan

Dekonstruksi Filologis *Al-Yatim*: Menakar Kepincangan Struktural dalam Kebijakan Makanan Bergizi Gratis

Secara etimologis, terminologi "yatim" dalam tradisi linguistik Arab berakar dari kata *ya-ta-ma* yang secara harfiah bermakna *al-infirad* atau kesendirian.⁹ Secara bahasa, yatim bermakna "*al-infirad*" atau kesendirian/tunggal. Istilah ini digunakan untuk menyebut sesuatu yang terpisah dari padanannya karena keistimewaannya, seperti ungkapan "*durrah yatimah*" untuk mutiara yang tiada banding keindahannya. Dalam konteks manusia, yatim adalah mereka yang kehilangan ayah sebelum usia balig, sedangkan pada hewan, status yatim terjadi karena kehilangan induk betina.¹⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa secara filosofis, "*yatim*" tidak hanya terbatas pada status biologis seorang anak yang kehilangan ayah, melainkan merujuk pada entitas yang

⁹ Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad bin al-Mufadhhal al-Raghib al-Isfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*, vol. 1 (Makkah Mukarramah: Maktabah Nizar Mustafa Al-Baz, 1997), 715.

¹⁰ Abu al-Abbas Ahmad bin Yusuf bin Muhammad bin Mas'ud al-Halabi, *Umdatul Huffaz Fi Tafsir Asyraf Al-Alfaz*, vol. 4 (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyat, 1996), 350-351.

kehilangan pilar pendukung utama sehingga ia berada dalam kondisi statis, menyendiri, dan rentan di tengah dinamika ekosistem yang keras.¹¹

Prof. Salman Harun melalui karya *Secangkir Tafsir* mereinterpretasi radikal terhadap makna linguistik ini ke dalam ranah sosiologis-struktural. Beliau menegaskan bahwa "*keyatiman*" dalam Surah al-Dhuha mempresentasikan problem umum manusia, yaitu kepincangan (*gap*) sosial antara golongan kuat dan golongan lemah. Dalam perspektif ini, makna "*al-infirad*" (kesendirian) bertransformasi menjadi potret kelompok masyarakat yang "terisolasi" dari perlindungan sistemik.¹² Melirik kebijakan Program Makan Bergizi Gratis, para penerima manfaat merupakan representasi dari "*yatim struktural*" kelompok rentan yang nasib kesejahteraannya sangat bergantung pada presisi perlindungan fiskal dan regulasi negara sebagai pengganti pilar penyokong yang hilang.¹³

Keselarasan makna ini semakin tajam jika disandingkan dengan analisis terhadap kata "*qahr*" pada larangan "*fala taqhar*". Secara bahasa, qahar bermakna melenyapkan kekuatan atau kelenturan sesuatu melalui tekanan ekstrem, seperti daging yang kehilangan sarinya saat dipanggang api. Melihat hubungan manusia, "*qahara*" berarti menaklukkan pihak lain dari posisi atas hingga mereka kehilangan pilihan dan terpaksa tunduk.¹⁴ Fenomena penindasan dalam kebijakan Makanan Bergizi Gratis ini bukan sekadar isu lokal. Sebagaimana dijelaskan dalam studi kasus mengenai kekerasan struktural di New York City, pelanggaran HAM sering kali terjadi melalui sistem yang terlihat "*mendukung*" rakyat namun sebenarnya mengabaikan hak-hak dasar yang lebih fundamental.¹⁵ Sehingga, negara sebagai pemegang otoritas¹⁶ "*menundukkan*" nasib masyarakat ke dalam ketidakpastian fiskal. Kebijakan yang bersifat spekulatif dan tidak

¹¹ Muhammad Subhi Apriantoro, *Tafsir Ayat Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023), 144.

¹² Harun, *Secangkir Tafsir Juz Terakhir*.229

¹³ Diki Wahyudi, Azka Rizki, and Dewinnisa Thiflingga Ismanto, "Ketergantungan Penerima Bantuan Sosial Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang," *Jurnal Sosial Humaniora* (Malang) 3, no. 1 (February 2026): 16–24, <https://doi.org/10.70214/jwcm4c85>.

¹⁴ Muhammad Hasan Hasan Jabal, *Al-Mu'jam al-Isytiqaqi al-Muashshil Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, vol. 1 (Kairo: Maktabah Al-Adab, 2010), 1854.

¹⁵ Diana Rodríguez-Gómez and S. Garnett Russell, "Human Rights Violations Through Structural Violence: A Case Study of Human Rights Education in New York City," *American Educational Research Journal* 59, no. 1 (February 2022): 38–72, <https://doi.org/10.3102/00028312211057307>.

¹⁶ Stephanie Lenhart and Dalten Fox, "Participatory Democracy in Dynamic Contexts: A Review of Regional Transmission Organization Governance in the United States," *Energy Research & Social Science* 83 (January 2022): 102345, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102345>.

transparan secara hakikat memaksa kaum lemah untuk menanggung beban inefisiensi,¹⁷ yang secara filosofis setara dengan tindakan mengeksploitasi ketidakberdayaan anak yatim.

Sebagai penutup analisis pada bagian ini, sinkronisasi antara dekonstruksi filologis dan realitas kebijakan Makanan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa etika Al-Qur'an menuntut lebih dari sekadar pemberian bantuan fisik. Larangan "*fala taqhar*" mewajibkan adanya integritas kepengurusan¹⁸ yang utuh. Mengelola program bagi masyarakat rentan dengan cara yang tidak sistematis bukan hanya cacat secara administrasi, melainkan sebuah bentuk kesewenang-wenangan teologis. Perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam kepincangan struktural menuntut negara untuk hadir dengan sistem yang presisi dan transparan,¹⁹ memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjadi jembatan keadilan, bukan instrumen yang melanggengkan kerentanan melalui manajemen anggaran yang nir-akuntabilitas.

Patologi Anggaran "*Serampangan*": Analisis Etika Kebijakan melalui Larangan *Al-Qahr*

Dalam diskursus kebijakan publik, efektivitas program nasional bergantung pada ketepatan, profesionalisme, dan kecermatan yang paripurna.²⁰ Surah al-Dhuha melalui pengalaman hidup Nabi SAW yang bergerak dari kondisi kekurangan menuju kecukupan, menandakan bahwa setiap transisi kebijakan harus didasari oleh perencanaan yang matang dan empati intelektual.²¹ Namun, fakta lapangan pada Program Makan Bergizi Gratis justru menunjukkan gejala "*patologi anggaran*" yang akut.²² Perencanaan yang

¹⁷ Sri Wahyuni and Rahmawati Sudirman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik: Memperkuat Demokrasi Dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah," *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 4, no. 4 (April 2026): 2201, <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.433>.

¹⁸ Sarwo Edy and Sumarta Sumarta, *Manajemen Sumber Daya Insani: Dalam Membangun Budaya Kerja Islami Profesional Dan Berintegritas* (Indramayu: PT Adab Indonesia, 2025), 152.

¹⁹ Komisi Pemilihan Umum, "Good Governance: Kunci untuk Menerapkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel," Kabupaten Nduga: KPU (Komisi Pemilihan Umum), October 23, 2025, https://kab-nduga.kpu.go.id/blog/read/8131_good-governance-kunci-untuk-menerapkan-pemerintahan-yang-bersih-transparan-dan-akuntabel.

²⁰ Yeni Suryani, Haeruddin Haeruddin, and Akhmad Akhmad, "Analisis Dampak Pembaharuan Kurikulum Nasional Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dan Kesiapan Profesionalisme Guru," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 3 (August 2025): 7222–28, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i3.47196>.

²¹ Shafiyyurrahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Faqirullah al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiqul Makhtum: Bahtsun Fis Siratin Nabawiyati 'ala Shahibiha Afdhalush Shalati Was Sallam*, vol. 1 (Qatar: Wizarat al-Awqaf wa Shu'un al-Islamiyah, 2006), 76.

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Menyoal Konstitusionalitas Makanan Bergizi Gratis 'Potong' Anggaran Pendidikan dalam APBN 2026," Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

bersifat spekulatif, volatilitas angka alokasi dana, hingga pembelian komoditas yang tidak memiliki urgensi fungsional mencerminkan sebuah tata kelola yang tidak sistematis, atau "serampangan".²³

Etika Qur'an menegaskan, kebijakan yang disusun tanpa kalkulasi teknokratis yang presisi adalah manifestasi modern dari perilaku *qahr* (kesewenang-wenangan). Larangan "*fala taqhar*" dalam ayat ke-9 tidak hanya berlaku pada kekerasan fisik terhadap anak yatim, tetapi juga pada "kekerasan administratif" terhadap rakyat rentan. Klimaksnya, tindakan terstruktur yang sewenang-wenang tidak terkontrol dan mengorbankan masyarakat.²⁴ Ketika negara memaksakan pengadaan barang yang tidak diperlukan namun mengabaikan detail operasional yang krusial, negara secara hakikat mempertaruhkan kebutuhan hidup rakyat.²⁵ Kecacatan ini bermanifestasi secara tragis pada kasus-kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di beberapa daerah.²⁶ Insiden ini bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan bukti nyata dari rendahnya standar kontrol kualitas (*quality control*) yang lahir dari rahim anggaran yang dipaksakan demi target populis semata.²⁷

Lebih mendalam, penindasan struktural dalam manajemen anggaran Makanan Bergizi Gratis terlihat dari adanya *opportunity cost* yang hilang akibat inefisiensi fiskal. Anggaran masif yang terserap untuk pengadaan sarana yang tidak bermanfaat adalah bentuk pengabaian terhadap hak kaum "*yatim struktural*" untuk mendapatkan layanan yang paling berkualitas.²⁸ Dalam perspektif Prof. Salman Harun, mengelola urusan kaum

February 5, 2026, [https://www.mkri.id/berita/menyoal-konstitusionalitas-Makanan Bergizi Gratis-%E2%80%9Cpotong%E2%80%9D-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2026--24536](https://www.mkri.id/berita/menyoal-konstitusionalitas-Makanan_Bergizi_Gratis-%E2%80%9Cpotong%E2%80%9D-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2026--24536).

²³ Firda Janati and Robertus Belarminus, "Kepala BGN Bantah Pengadaan Kaos Kaki: Itu Bagian Perlengkapan Pendidikan SPPG," Jakarta: Kompas.com, April 13, 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/13/18523801/kepala-bgn-bantah-pengadaan-kaos-kaki-itu-bagian-perlengkapan-pendidikan>.

²⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 15 (Tangerang: Lentera Hati, 2000), 340-342.

²⁵ CNN Indonesia, "Pengadaan Puluhan Ribu Motor Listrik Makanan Bergizi Gratis Disorot KPK Baca artikel CNN Indonesia 'Pengadaan Puluhan Ribu Motor Listrik Makanan Bergizi Gratis Disorot KPK,'" Jakarta: CNN Indonesia, February 5, 2026, [https://www.mkri.id/berita/menyoal-konstitusionalitas-Makanan Bergizi Gratis-%E2%80%9Cpotong%E2%80%9D-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2026--24536](https://www.mkri.id/berita/menyoal-konstitusionalitas-Makanan_Bergizi_Gratis-%E2%80%9Cpotong%E2%80%9D-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2026--24536).

²⁶ Silvi Rahmani et al., "Manajemen Krisis Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis." *CARAKA : Indonesia Journal of Communication* 6, no. 2 (December 2025): 414–25, <https://doi.org/10.25008/caraka.v6i2.250>.

²⁷ Delfira Rahmatia Utami et al., "Relokasi Anggaran Pendidikan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Dan Reproduksi Ketidaksetaraan Sosial Dalam Perspektif Pierre Bourdieu," *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 12, no. 01 (March 2026): 146–59, <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i01.12032>.

²⁸ Tempo. com Tempo.com, "BGN Hamburkan Rp 1,5 Miliar buat Beli Sikat dan Semir Sepatu," Tempo.com, Jakarta Selatan: Tempo.com, April 17, 2026.

lemah dengan ketidaksiapan manajerial adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat kekuasaan. Negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung justru menjadi pihak yang mengekspos rakyatnya pada risiko kesehatan dan ketidakpastian ekonomi.

Sebagai penutup, patologi anggaran ini menegaskan bahwa tanpa adanya akuntabilitas dan perencanaan yang berbasis data riil, Program Makanan Bergizi Gratis hanya akan menjadi instrumen kesewenang-wenangan administratif yang diikuti dengan narasi kebaikan. Kasus keracunan dan pemborosan anggaran adalah "*alarm*" teologis bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam Surah al-Dhuha telah terabaikan.²⁹ Kritik terhadap keserampangan ini bukan bertujuan menghalangi program, melainkan mendesak negara agar kembali pada prinsip *fala taqhar*: yakni mengelola amanah publik dengan penuh kecermatan, profesionalisme, dan tanggung jawab moral yang absolut di hadapan Tuhan dan rakyat.³⁰

Relasi Kuasa dan Risiko Eksploitasi: Ancaman "*Golongan Kuat*" dalam Celah Transparansi Fiskal

Eksistensi program besar dengan anggaran masif seperti Makan Bergizi Gratis sering kali menjadi magnet bagi praktik beberapa pejabat apabila tidak disertai dengan transparansi fiskal yang absolut.³¹ Prof. Salman Harun memberikan peringatan esensial bahwa kelemahan sosial-struktural sering kali menjadi sasaran empuk bagi eksploitasi "golongan kuat".³² Dalam kacamata sosiologi-politik, golongan kuat ini tidak hanya merujuk pada pemilik modal besar, tetapi juga elit birokrasi yang memiliki akses eksklusif terhadap otoritas. Ketika manajemen anggaran bersifat tertutup dan tidak sistematis, tercipta asimetri informasi yang memungkinkan terjadinya pengalihan sumber daya publik demi kepentingan privat atau kelompok tertentu.³³

²⁹ Alustina Suci Manah, "Analisis Sentimen Publik Terhadap Kasus Keracunan Makanan Bergizi Gratis Berbasis Data Media Sosial Menggunakan Model Indobert," *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 14, no. 2 (April 2026), <https://doi.org/10.23960/jitet.v14i2.9404>.

³⁰ Adzam Adzam et al., *Dinamika Kebijakan Fiskal Dan Moneter Di Indonesia* (Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2024), 81-82.

³¹ Yoyok Rahayu Basuki, *Makanan Bergizi Gratis: Jalan Menuju Indonesia Bangkrut 2030* (Bogor: Azhar Publisher, 2024), 20.

³² Paulus Febri Rabuni and FX. Eko Armada Riyanto, "Kepemimpinan Publik Di Tengah Krisis Kepercayaan Politik Di Indonesia Menurut Filsafat Politik Niccolo Machiavelli," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 2 (March 2026): 181-90, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1893>.

³³ Intan Rachmina Koho, "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia," *Lensa* 15, no. 1 (March 2021): 60-73, <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6>.

Di antara indikator nyata dari kesewenang-wenangan (*qahr*) dalam sub-sistem program ini adalah lemahnya meritokrasi dalam perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana.³⁴ Penunjukan tim atau vendor yang didasarkan pada kedekatan politik ketimbang kompetensi profesional merupakan bentuk pengabaian terhadap hak kaum rentan.³⁵ Secara teologis, memberikan amanah kepada pihak yang nir-kapabilitas adalah bentuk pengkhianatan terhadap perintah "*fala taqhar*" sekaligus menyelisihi prinsip meritokrasi.³⁶ Jika SDM pengelola dipilih melalui mekanisme yang koruptif atau nepotistik, sehingga kualitas layanan yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah sebagai objek perlindungan terdegradasi. Hal ini mengonfirmasi kekhawatiran Salman Harun mengenai kelompok kuat yang "*memangsa*" hak kalangan lemah melalui celah tata kelola yang sengaja dibiarkan buram.

Potensi eksploitasi ini juga termanifestasi dalam rantai pasok logistik yang rentan dimonopoli oleh entitas korporasi besar dengan mengabaikan partisipasi ekonomi lokal.³⁷ Anggaran yang dialokasikan secara serampangan tanpa audit publik yang ketat membuka peluang terjadinya penurunan standar gizi demi maksimalisasi keuntungan vendor.³⁸ Fenomena "*pembelian barang yang tidak diperlukan*" atau *overpricing* sarana prasarana merupakan bukti empiris adanya inefisiensi yang direncanakan. Setiap rupiah yang diselewengkan dalam proses ini sebenarnya adalah hak "*yatim struktural*" yang dirampas secara halus oleh kekuatan hegemonik di balik layar birokrasi.³⁹

Dengan demikian, relasi kuasa yang timpang dalam Program Makanan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kesewenang-wenangan struktural dapat hidup subur dalam narasi bantuan sosial.⁴⁰ Jika negara membiarkan meritokrasi SDM berjalan tanpa standar yang

³⁴ Dedi Prasetyo, *Rekrutmen, Meritokrasi, Dan Teknologi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2026), 294-295.

³⁵ Novita Sabarwati, Diana Indah, and Indrianti Kamil, "Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test Dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat," *JTTKP: Jurnal Tata Kelola Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (November 2025): 594–607, <https://jurnal.prestasiku.org/index.php/jtkkp/article/view/81>.

³⁶ Ermaya Suradinata, *Kepemimpinan Pemerintahan Presiden Jenderal Tni (Purn) Prabowo Subianto Geopolitik Peta Jalan Gerakan Menuju Indonesia Raya* (Semarang: Cahya Ghani Recovery, 2025), 195.

³⁷ Majalahaula. id Majalahaudi.id, *Meneladani Mbah Moen, Membangun Kepemimpinan Substansial*, October 2025.

³⁸ Mustapa Kamil Alga Beruh and Lusiana Lusiana, "Program Makan Bergizi Gratis Dan Implikasi Sosial, Ekonomi, Dan Politik Terhadap Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Indonesia," *Indonesian Social Science Review* 4, no. 1 (March 2026): 59–67, <https://doi.org/10.61105/issr.v4i1.380>.

³⁹ Janati and Belarminus, "<https://nasional.kompas.com/read/2026/04/13/18523801/kepala-bgn-bantah-pengadaan-kaos-kaki-itu-bagian-perlengkapan-pendidikan>."

⁴⁰ Majalahaula. id Majalahaudi.id, "300Hari Kerja, Prabowo Lebih Berani," *Majalah Nahdlatul Ulama*, September 2025.

jelas dan membiarkan anggaran menjadi "*rebutan*" elit, maka negara secara esensial telah melanggar etika kemanusiaan universal yang digariskan dalam Surah al-Dhuha. Kritik terhadap fenomena ini adalah upaya untuk menuntut rekonstruksi sistemik, yaitu kekuasaan tidak digunakan untuk menundukkan yang lemah melalui penindasan administratif, melainkan untuk memberdayakan mereka melalui sistem yang adil, terbuka, dan profesional sesuai dengan spirit kepengasuhan teologis yang diusung oleh Prof. Salman Harun.

Manifestasi *Fala Taqhar* dalam Akuntabilitas Publik: Rekonstruksi Etika Anggaran Qur'ani

Langkah solutif atas berbagai patologi kebijakan yang telah dibedah, diperlukan sebuah rekonstruksi tata kelola anggaran yang berlandaskan pada etika Qur'ani. Prof. Salman Harun dalam *Secangkir Tafsir* menekankan bahwa kesadaran akan masa lalu yang penuh keterbatasan seharusnya melahirkan komitmen keberpihakan yang absolut setelah seseorang memegang otoritas.⁴¹ Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, prinsip "*fala taqhar*" harus dimanifestasikan ke dalam bentuk akuntabilitas publik yang radikal. Akuntabilitas ini bukan sekadar kewajiban administratif-formal, melainkan sebuah bentuk "*syukur teologis*" yaitu transparansi penggunaan dana negara menjadi bukti nyata integritas penguasa dalam menjaga amanah rakyat.⁴²

Rekonstruksi ini menuntut adanya digitalisasi sistem pengawasan anggaran yang dapat diakses oleh publik secara *real-time*.⁴³ Langkah ini krusial untuk menutup celah bagi "*golongan kuat*" yang berupaya mengeksploitasi asimetri informasi demi perburuan rente. Dengan adanya transparansi radikal, ruang bagi nepotisme dalam meritokrasi Sumber Daya Manusia dan inefisiensi pengadaan barang dapat diminimalisir secara signifikan.⁴⁴ Secara esensial, kebijakan yang akuntabel adalah kebijakan yang

⁴¹ Harun, *Secangkir Tafsir Juz Terakhir*.228

⁴² Bening Tirta Wibowo, Friski Ardeka Sahda Rianestu, and Indra Devian Lumban Gaol, "Transparansi Dan Pengawasan Keuangan Negara Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MAKANAN BERGIZI GRATIS)," *Jurnal Media Administrasi* 11, no. 1 (April 2026): 64–70, <https://doi.org/10.56444/jma.v11i1.3670>.

⁴³ Wina Santika, "Simulasi Hitung Anggaran Makanan Bergizi Gratis per Porsi: Rincian Biaya dan Cara Kelola Dapur SPPG," *Accounting+*, Accounting+, April 14, 2026.

⁴⁴ Nurfitri Zulaikha, Desti Lestari, and Hanifah Istiqomah, "Tantangan Implementasi Dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (June 2025): 426–35, <https://doi.org/file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/JPIM+Nurfitri+Zulaika+dkk.pdf>.

memuliakan martabat penerima manfaat,⁴⁵ ia memastikan bahwa setiap butir nasi dan nutrisi yang sampai ke tangan anak-anak sekolah adalah hasil dari proses manajerial yang bersih, profesional, dan jauh dari praktik kesewenang-wenangan struktural.⁴⁶

Klimaksnya, etika anggaran Qur'ani menuntut negara untuk memposisikan diri bukan sebagai penguasa yang menundukkan, melainkan sebagai *kafil* (pengasuh) yang melayani dengan empati intelektual.⁴⁷ Program Makanan Bergizi Gratis harus digeser dari sekadar instrumen populisme politik menuju kebijakan kemanusiaan yang memiliki kedalaman moral. Penegakan prinsip ketepatan dalam perencanaan fiskal adalah syarat mutlak agar janji kesejahteraan tidak berubah menjadi beban penderitaan bagi masa depan bangsa.⁴⁸ Dengan menjadikan spirit Surah al-Dhuha sebagai kompas kebijakan, maka manajemen publik akan kembali pada khitahnya: yaitu memperkecil kepincangan sosial dan memastikan bahwa hak-hak kelompok paling rentan terlindungi dari segala bentuk penindasan sistemik

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reinterpretasi Prof. Salman Harun terhadap Surah al-Dhuha ayat 9 memberikan landasan etis-transformatif dalam membedah kebijakan publik kontemporer. Konsep "*keyatiman*" yang didekonstruksi sebagai kepincangan (*gap*) struktural menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis menempatkan penerima manfaat dalam posisi rentan yang menuntut perlindungan sistemik. Berdasarkan analisis filologis dan sosiologis, praktik manajemen anggaran yang "serampangan", ketiadaan meritokrasi Sumber Daya Manusia, serta inefisiensi pengadaan barang merupakan manifestasi nyata dari perilaku *qahr* (kesewenang-wenangan) administratif yang dilarang oleh Al-Qur'an. Kesewenang-wenangan ini bukan sekadar cacat prosedur, melainkan pelanggaran teologis karena mengeksploitasi hak kaum lemah demi kepentingan politik-ekonomi golongan kuat. Sebagai rekomendasi, rekonstruksi

⁴⁵ Narlhiandini Mitresna Widyadhana, Resti Anisha Putry, and Narlhiandini Mitresna Widyadhana, "Tinjauan Nilai Gizi Dari Program Makanan Bergizi Gratis (Makanan Bergizi Gratis) Presiden Ri," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 4 (December 2025): 14843–53, <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i4.51554>.

⁴⁶ Kementerian Komunikasi dan Digital, "Tiga Strategi Pemerintah Jaga Anak Indonesia: Gizi, Digital, dan Budaya," Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat: KOMDIGI, October 5, 2025.

⁴⁷ Gunawan Sumodiningrat, Nyoto Suwignyo, and Totok Sedyontoro, *PLATFORM GIZI NASIONAL: Membangun Ekosistem Monitoring Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2026), 2.

⁴⁸ Dedi Prasetyo, *Gugus Tugas Makanan Bergizi Gratis Polri Buku Panduan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Polri Cetakan Keempat* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2025), 110.

etika anggaran publik harus dikembalikan pada prinsip akuntabilitas sebagai bentuk syukur teologis. Negara wajib mengintegrasikan transparansi fiskal radikal dan profesionalisme (*itqan*) untuk menutup celah perburuan rente dan memastikan keamanan serta kualitas layanan bagi rakyat. Transformasi Program Makanan Bergizi Gratis dari kebijakan populis menjadi kebijakan berbasis empati Qur'ani adalah keharusan mutlak untuk mewujudkan keadilan sosial yang substantif. Dengan menjadikan spirit Surah al-Dhuha sebagai kompas, tata kelola negara diharapkan mampu melindungi martabat kelompok "*yatim struktural*" dari segala bentuk penindasan sistemik, sekaligus memastikan bahwa kekuasaan benar-benar hadir sebagai pengasuh bagi kesejahteraan bangsa

DAFTAR PUSTAKA

- Adzam, Adzam, Mitra Musika Lubis, Welia Wida Rahmayani, Sri Yani Kusumastuti, Fajarwati Kusumardhani, Suci Juniartika, and Riel Nurul Fathah. *Dinamika Kebijakan Fiskal Dan Moneter Di Indonesia*. Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2024. 81-82.
- Apriantoro, Muhammad Subhi. *Tafsir Ayat Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023. 144.
- Basuki, Yoyok Rahayu. *Makanan Bergizi Gratis: Jalan Menuju Indonesia Bangkrut 2030*. Bogor: Azhar Publisher, 2024. 20.
- Bening Tirta Wibowo, Friski Ardeka Sahda Rianestu, and Indra Devian Lumban Gaol. "Transparansi Dan Pengawasan Keuangan Negara Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Media Administrasi* 11, no. 1 (April 2026): 64–70. <https://doi.org/10.56444/jma.v11i1.3670>.
- Beruh, Mustapa Kamil Alga, and Lusiana Lusiana. "Program Makan Bergizi Gratis Dan Implikasi Sosial, Ekonomi, Dan Politik Terhadap Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Indonesia." *Indonesian Social Science Review* 4, no. 1 (March 2026): 59–67. <https://doi.org/10.61105/issr.v4i1.380>.
- BGN, Internal. "Pentingnya Program Makanan Bergizi Gratis: Tingkatkan SDM dan Pencegahan Stunting." Jakarta: Badan Gizi Nasional, April 6, 2025. [https://www.bgn.go.id/news/artikel/pentingnya-program-Makanan Bergizi Gratis-tingkatkan-sdm-dan-pencegahan-stunting](https://www.bgn.go.id/news/artikel/pentingnya-program-Makanan-Bergizi-Gratis-tingkatkan-sdm-dan-pencegahan-stunting).

- Chikita Ramadhani, Farrelia Syafiq, Musthofa Muyassar Firdaus, and Mokh Iman Firmansyah. "Pemahaman Kualitas Gizi Dan Kehalalan Program Makanan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Mahasiswa Gizi: Tinjauan Hadis Nabi Muhammad Saw Terhadap Isu Kontaminasi Dan Pangan Ultra – Proses." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 15, no. 1 (January 2026): 104–17. <https://doi.org/10.52657/jik.v15i1.3408>.
- Digital, Kementerian Komunikasi dan. "Tiga Strategi Pemerintah Jaga Anak Indonesia: Gizi, Digital, dan Budaya." Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat: KOMDIGI, October 5, 2025.
- Edy, Sarwo, and Sumarta Sumarta. *Manajemen Sumber Daya Insani: Dalam Membangun Budaya Kerja Islami Profesional Dan Berintegritas*. Indramayu: PT Adab Indonesia, 2025. 152.
- Halabi, Abu al-Abbas Ahmad bin Yusuf bin Muhammad bin Mas'ud al-. *Umdatul Huffaz Fi Tafsir Asyraf Al-Alfaz*. Vol. 4. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyat, 1996. 350-351.
- Harun, Salman. *Secangkir Tafsir Juz Terakhir*. Tangerang: Lentera Hati, 2017. 228.
- Indonesia, CNN. "Pengadaan Puluhan Ribuan Motor Listrik Makanan Bergizi Gratis Disorot KPK Baca artikel CNN Indonesia 'Pengadaan Puluhan Ribuan Motor Listrik Makanan Bergizi Gratis Disorot KPK.'" Jakarta: CNN Indonesia, February 5, 2026. <https://www.mkri.id/berita/menyoal-konstitusionalitas-Makanan Bergizi Gratis-%E2%80%9Cpotong%E2%80%9D-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2026--24536>.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. "Ahli: Negara Wajib Memenuhi Hak Dasar Warga Negara dari Kelas Pekerja." Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, June 8, 2024. <https://www.mkri.id/berita/ahli:-negara-wajib-memenuhi-hak-dasar-warga-negara-dari-kelas-pekerja-21258>.
- . "Menyoal Konstitusionalitas Makanan Bergizi Gratis 'Potong' Anggaran Pendidikan dalam APBN 2026." Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, February 5, 2026. <https://www.mkri.id/berita/menyoal-konstitusionalitas-Makanan Bergizi Gratis-%E2%80%9Cpotong%E2%80%9D-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2026--24536>.

- Isfahani, Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad bin al-Mufadhhdhal al-Raghib al-. *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*. Vol. 1. Makkah Mukarramah: Maktabah Nizar Mustafa Al-Baz, 1997. 715.
- Jabal, Muhammad Hasan Hasan. *Al-Mu'jam al-Isytiqaqi al-Muashshil Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Vol. 1. Kairo: Maktabah Al-Adab, 2010. 1854.
- Janati, Firda, and Robertus Belarminus. "Kepala BGN Bantah Pengadaan Kaos Kaki: Itu Bagian Perlengkapan Pendidikan SPPG." Jakarta: Kompas.com, April 13, 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/13/18523801/kepala-bgn-bantah-pengadaan-kaos-kaki-itu-bagian-perlengkapan-pendidikan>.
- Koho, Intan Rachmina. "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia." *Lensa* 15, no. 1 (March 2021): 60–73. <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6>.
- Koton, Yosef P., Djefrianto Nusi, and Misbahudin Djaba. *Kontribusi Program Makanan Bergizi Gratis (Makanan Bergizi Gratis) Terhadap Ekonomi Lokal Di Provinsi Gorontalo*. (Universitas Bina Taruna Gorontalo) 2, no. 2 (November 2025): 110–18. <https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/P-JIAMS/article/view/410/418>.
- Lenhart, Stephanie, and Dalten Fox. "Participatory Democracy in Dynamic Contexts: A Review of Regional Transmission Organization Governance in the United States." *Energy Research & Social Science* 83 (January 2022): 102345. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102345>.
- Majalahaudi.id, Majalahaula. id. "300Hari Kerja, Prabowo Lebih Berani." *Majalah Nahdlatul Ulama*, September 2025.
- . *Meneladani Mbah Moen, Membangun Kepemimpinan Substansial*. October 2025.
- Manah, Alustina Suci. "Analisis Sentimen Publik Terhadap Kasus Keracunan Makanan Makanan Bergizi Gratis Berbasis Data Media Sosial Menggunakan Model Indobert." *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 14, no. 2 (April 2026). <https://doi.org/10.23960/jitet.v14i2.9404>.
- Mubarakfuri, Shafiyurrahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Faqirullah al-. *Ar-Rahiqul Makhtum: Bahtsun Fis Siratin Nabawiyati 'ala Shahibiha Afdhalush Shalati Was Sallam*. Vol. 1. Qatar: Wizarat al-Awqaf wa Shu'un al-Islamiyah, 2006. 76.

- Nasional, Badan Gizi. “Kepala BGN Tegaskan Penggunaan Keuangan Negara Dilakukan Berlapis dan Transparan.” Jakarta: Badan Gizi Nasional, April 8, 2026. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/kepala-bgn-tegaskan-penggunaan-keuangan-negara-dilakukan-berlapis-dan-transparan>.
- Nugroho, Agung. “Program Makanan Bergizi Gratis Dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu.” Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, March 11, 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/program-Makanan-Bergizi-Gratis-dinilai-berisiko-pemborosan-sebaiknya-diprioritaskan-pada-anak-keluarga-kurang-mampu/>.
- Prasetyo, Dedi. *Gugus Tugas Makanan Bergizi Gratis Polri Buku Panduan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Polri Cetakan Keempat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2025. 110.
- . *Rekrutmen, Meritokrasi, Dan Teknologi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2026. 294-295.
- Rabuni, Paulus Febri, and FX. Eko Armada Riyanto. “Kepemimpinan Publik Di Tengah Krisis Kepercayaan Politik Di Indonesia Menurut Filsafat Politik Niccolo Machiavelli.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 2 (March 2026): 181–90. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1893>.
- Rahmani, Silvi, Akhdan Raja Irdiantama, Memil Febriyani, Muhammad Rapi Pramudya, Rima Dhuriana Firli Nuraini, and Rajab Ritonga. “Manajemen Krisis Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis.” *CARAKA : Indonesia Journal of Communication* 6, no. 2 (December 2025): 414–25. <https://doi.org/10.25008/caraka.v6i2.250>.
- Rahmatia Utami, Delfira, Nur Rizki Febrianti, Galuh Locita Salsabila, Mita Utami, Utami Pratiwi, and Rudy Kurniawan. “Relokasi Anggaran Pendidikan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Dan Reproduksi Ketidaksetaraan Sosial Dalam Perspektif Pierre Bourdieu.” *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 12, no. 01 (March 2026): 146–59. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i01.12032>.
- Rodríguez-Gómez, Diana, and S. Garnett Russell. “Human Rights Violations Through Structural Violence: A Case Study of Human Rights Education in New York City.” *American Educational Research Journal* 59, no. 1 (February 2022): 38–72. <https://doi.org/10.3102/00028312211057307>.

- Sabarwati, Novita, Diana Indah, and Indrianti Kamil. "Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test Dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat." *JTTKP: Jurnal Tata Kelola Dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (November 2025): 594–607. <https://jurnal.prestasiku.org/index.php/jtkkp/article/view/81>.
- Santika, Wina. "Simulasi Hitung Anggaran Makanan Bergizi Gratis per Porsi: Rincian Biaya dan Cara Kelola Dapur SPPG." *Accounting+*, *Accounting+*, April 14, 2026.
- Shihab, Muhammmad Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 15. Tangerang: Lentera Hati, 2000. 340-342.
- Sumodiningrat, Gunawan, Nyoto Suwignyo, and Totok Sedyontoro. *PLATFORM GIZI NASIONAL: Membangun Ekosistem Monitoring Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2026. 2.
- Suradinata, Ermaya. *Kepemimpinan Pemerintahan Presiden Jenderal Tni (Purn) Prabowo Subianto Geopolitik Peta Jalan Gerakan Menuju Indonesia Raya*. Semarang: Cahya Ghani Recovery, 2025. 195.
- Suryani, Yeni, Haeruddin Haeruddin, and Akhmad Akhmad. "Analisis Dampak Pembaharuan Kurikulum Nasional Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dan Kesiapan Profesionalisme Guru." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 3 (August 2025): 7222–28. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i3.47196>.
- Tempo.com, Tempo. com. "BGN Hamburkan Rp 1,5 Miliar buat Beli Sikat dan Semir Sepatu." *Tempo.com*, Jakarta Selatan: Tempo.com, April 17, 2026.
- Umum, Komisi Pemilihan. "Good Governance: Kunci untuk Menerapkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel." Kabupatn Nduga: KPU (Komisi Pemilihan Umum), October 23, 2025. https://kab-nduga.kpu.go.id/blog/read/8131_good-governance-kunci-untuk-menerapkan-pemerintahan-yang-bersih-transparan-dan-akuntabel.
- Wahyudi, Diki, Azka Rizki, and Dewinnisa Thiflingga Ismanto. "Ketergantungan Penerima Bantuan Sosial Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang." *Jurnal Sosial Humaniora* (Malang) 3, no. 1 (February 2026): 16–24. <https://doi.org/10.70214/jwcm4c85>.

- Wahyuni, Sri, and Rahmawati Sudirman. "Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik: Memperkuat Demokrasi Dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 4, no. 4 (April 2026): 2201. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.433>.
- Watch, Indonesia Corruption. "Makan Gratis Pakai Anggaran Pendidikan: Tipu-Tipu Pemenuhan 20% APBN untuk Pendidikan." Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, August 30, 2024. <https://antikorupsi.org/id/makan-gratis-pakai-anggaran-pendidikan-tipu-tipu-pemenuhan-20-apbn-untuk-pendidikan>.
- Widyadhana, Narlhiandini Mitresna, Resti Anisha Putry, and Narlhiandini Mitresna Widyadhana. "Tinjauan Nilai Gizi Dari Program Makan Bergizi Gratis (Makanan Bergizi Gratis) Presiden Ri." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 4 (December 2025): 14843–53. <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i4.51554>.
- Zulaikha, Nurfitri, Desti Lestari, and Hanifah Istiqomah. "Tantangan Implementasi Dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (June 2025): 426–35. <https://doi.org/file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/JPIM+Nurfitri+Zulaika+dkk.pdf>.